

**PARTISIPASI MASYARAKAT PADA BIDANG EKONOMI PASCA BANTUAN  
DANA DESA (STUDI DI DESA SINGKUANG II KECAMATAN  
MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL)**

**Dinul Hamdi**

Alumni Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UISU

eMail: dinulhamdi443@gmail.com

**Abstrak**

*Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan pontesi yang ada di masyarakat. Namun yang terjadi di Desa Singkuang II Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal dalam hal penggunaan dan pengelolaan dana desa masih minim terkait dengan keterlibatan atau partisipasi masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat pada bidang ekonomi pasca dana desa di Desa Singkuang II. Untuk mengetahui permasalahan tersebut penelitian menggunakan teori partisipasi masyarakat Isbandi (2007:27) dengan dimensi Keterlibatan Aktif, Transparansi dan Akses Informasi, Keadilan dan Kesetaraan, Penguatan Kapasitas dan pentingnya konteks lokal. Peneliti juga menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengetahui partisipasi masyarakat yang terjadi di Desa Singkuang II. Berdasarkan dengan penelitian yang telah dilakukan maka dapat dikatakan bahwa keterlibatan aktif masyarakat Desa Singkuang II telah dilibatkan ikut berpartisipasi dalam kegiatan pada bidang ekonomi pasca bantuan dana desa meskipun, keterlibatan aktif masyarakat tidak merata hal ini dikarenakan pemerintah Desa Singkuang II menyesuaikan dengan data penerima bantuan.*

*Keywords: Partisipasi, Masyarakat, Dana Desa*

**1. PENDAHULUAN**

Pembangunan ekonomi desa merupakan salah satu fokus utama kebijakan pembangunan nasional, khususnya setelah diberlakukannya kebijakan desentralisasi fiskal melalui dana desa. Dana desa diposisikan sebagai instrumen strategi untuk mempercepat pembangunan, mengurangi ketidakseimbangan antarwilayah, serta meningkatkan kesejahteraan desa masyarakat melalui penguatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks ini, keberhasilan pembangunan desa tidak hanya ditentukan oleh besarnya alokasi dana, tetapi juga

sejauh mana masyarakat terlibat secara aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program pembangunan.

Secara konsep, aktivitas ekonomi dipahami sebagai upaya manusia dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Prinsip ekonomi yang mencakup produksi, distribusi, dan konsumsi menjadi dasar dalam melihat dinamika ekonomi masyarakat desa. Peningkatan dana desa membuka peluang bagi masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi produktif, baik melalui usaha mandiri, pengelolaan sumber daya lokal, maupun pemanfaatan program-program pemerintah yang bersifat stimulatif. Dalam perspektif ekonomi

pembangunan, kebijakan dana desa diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa secara berkelanjutan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi yang dimiliki.

Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang bertujuan memberikan kewenangan lebih luas kepada desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dana tersebut digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan masyarakat. Program turunan dari dana desa, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Dana Stimulan, dirancang untuk membantu masyarakat miskin dan mendorong peningkatan aktivitas ekonomi. Namun, implementasi program-program tersebut sering kali menghadapi berbagai tantangan, seperti ketidaktepatan sasaran, rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan kapasitas pengelolaan, serta lemahnya pengawasan dan transparansi.

Partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci dalam memastikan efektivitas pemanfaatan dana desa. Partisipasi tidak hanya dimaknai sebagai keikutsertaan masyarakat secara fisik, tetapi juga keterlibatan dalam pengambilan keputusan, program pengelolaan, serta evaluasi hasil pembangunan. Pendekatan perencanaan partisipatif menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, sehingga kebijakan dan program yang dilaksanakan benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi akan menciptakan rasa memiliki (rasa memiliki) terhadap program pembangunan dan mendorong keinginan hasil pembangunan tersebut.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pemanfaatan dana desa berdampak positif terhadap pembangunan dan partisipasi masyarakat, terutama dalam bidang ekonomi dan infrastruktur. Namun demikian, masih

ditemukan permasalahan terkait pengelolaan dana, transparansi, serta rendahnya kapasitas dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi yang tersedia. Hal ini menunjukkan perlunya kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana implikasi dana desa terhadap partisipasi masyarakat di bidang ekonomi, khususnya di tingkat desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis partisipasi masyarakat di bidang ekonomi pasca peningkatan dana desa, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dana desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam kajian pengembangan kebijakan pembangunan desa, serta menjadi bahan pertimbangan praktis bagi pemerintah desa dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam partisipasi masyarakat di bidang ekonomi pasca pelaksanaan dana desa. Pendekatan kualitatif dipilih karena dianggap mampu menggali realitas sosial, pandangan, pengalaman, serta dinamika yang terjadi di masyarakat secara komprehensif dan kontekstual. Metode ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang lebih utuh mengenai fenomena yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui data numerik.

Penelitian dilaksanakan di Desa Singkuang II, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa desa tersebut merupakan salah satu desa penerima dana desa yang memanfaatkan dana tersebut dalam pengembangan kegiatan ekonomi

masyarakat. Waktu penelitian dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan, yang mencakup proses pengumpulan data dan analisis data.

Subjek dalam penelitian ini adalah informan, yaitu individu yang dianggap memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan dana desa dan partisipasi masyarakat di bidang ekonomi. Informan dipilih secara purposif, dengan mempertimbangkan keterlibatan mereka dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatan dana desa. Informan meliputi aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi yang didukung oleh dana desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi partisipan, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan refleksi literatur. Observasi partisipan dilakukan untuk mengamati secara langsung aktivitas masyarakat dan proses pengelolaan dana desa dalam bidang ekonomi. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih rinci mengenai persepsi, pengalaman, serta tingkat keterlibatan masyarakat terhadap pemanfaatan dana desa. Dokumentasi studi digunakan untuk melengkapi data primer melalui dokumen resmi, laporan desa, serta arsip terkait pengelolaan dana desa. Selain itu, observasi literatur dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal, dan regulasi yang relevan guna memperkuat landasan teoritis penelitian.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui triangulasi teknik, yang meliputi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari berbagai informan, triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan triangulasi waktu dilakukan dengan pengambilan data pada waktu yang berbeda untuk memastikan konsistensi informasi.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi ditranskripsikan, kemudian dianalisis dengan mengelompokkan informasi sesuai dengan fokus penelitian. Proses analisis dilakukan secara berkelanjutan sejak pengumpulan data hingga tahap akhir penelitian, sehingga diperoleh pemahaman yang mendalam mengenai partisipasi di bidang ekonomi masyarakat pasca dana desa.

### **3. PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Singkuang II telah berlangsung, khususnya pada bidang ekonomi pasca bantuan dana desa. Namun partisipasi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip partisipasi masyarakat yang ideal sebagaimana dikemukakan oleh Isbandi (2007), yaitu tekanan keterlibatan aktif, transparansi dan akses informasi, keadilan dan kesetaraan, penguatan kapasitas, serta kesepakatan dengan konteks lokal.

Dari aspek keterlibatan aktif, masyarakat Desa Singkuang II pada dasarnya telah dilibatkan dalam berbagai kegiatan desa, termasuk dalam program ekonomi yang bersumber dari dana desa. Keterlibatan ini terlihat melalui peran masyarakat sebagai penerima bantuan maupun sebagai tenaga pendukung dalam pelaksanaan program. Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan tersebut belum merata. Partisipasi masih didominasi oleh kelompok tertentu, sementara sebagian masyarakat lainnya hanya berperan sebagai penerima manfaat tanpa dilibatkan secara aktif dalam proses

perencanaan dan pengelolaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi yang terjadi cenderung bersifat instrumental, bukan partisipasi substantif, sehingga berpotensi menimbulkan citra sosial di tengah masyarakat.

Pada dimensi transparansi dan akses informasi, pemerintah desa berupaya menyampaikan informasi melalui berbagai saluran, seperti komunikasi langsung, peran kepala dusun, dan media sosial. Meskipun demikian, efektivitas penyampaian informasi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat. Akses terhadap informasi mengenai pengelolaan dana desa, khususnya terkait anggaran dan perencanaan, masih terbatas. Hal ini menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memahami mekanisme pengambilan keputusan dan penggunaan dana desa. Padahal, transparansi merupakan prasyarat utama untuk membangun kepercayaan masyarakat dan mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas dan bermakna.

Aspek keadilan dan kesetaraan menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Secara sosial, tidak ditemukan praktik diskriminasi yang bersifat langsung atau terbuka. Namun, dalam praktik penyaluran bantuan dan pelibatan masyarakat dalam program ekonomi desa, masih terdapat ketimpangan. Bantuan dan kesempatan berpartisipasi cenderung diterima oleh kelompok tertentu, sementara kelompok masyarakat lainnya merasa belum memperoleh kesempatan yang sama. Kondisi ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan dalam partisipasi masyarakat belum sepenuhnya terwujud, sehingga berpotensi menimbulkan

legitimasi kebijakan desa di mata masyarakat.

Penguatan kapasitas masyarakat juga menjadi persoalan krusial dalam implementasi partisipasi masyarakat di Desa Singkuang II. Secara normatif, pemerintah desa menyatakan telah melakukan upaya pemberdayaan melalui pelatihan dan pembekalan keterampilan. Namun, hasil observasi dan wawancara dengan masyarakat menunjukkan adanya kesenjangan antara pernyataan aparat desa dan kenyataan di lapangan. Pelatihan cenderung hanya diberikan kepada aparatur desa atau kelompok tertentu, sementara masyarakat umum tidak memperoleh akses yang sama terhadap peningkatan kapasitas. Padahal, menurut konsep pemberdayaan, peningkatan kapasitas merupakan fondasi utama agar masyarakat mampu berpartisipasi secara efektif dan mandiri dalam pembangunan desa.

Dari sisi konteks lokal, pemanfaatan dana desa melalui pengembangan usaha sarang burung walet dapat dinilai relevan dengan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Usaha ini sesuai dengan mata pencaharian dan potensi lokal yang telah dikenal oleh masyarakat. Namun anggapan bahwa masyarakat telah memiliki kemampuan yang mumpuni tanpa perlu pembekalan lebih lanjut menjadi kelemahan dalam implementasinya. Tanpa penguatan kapasitas yang berkelanjutan, pemanfaatan potensi lokal berisiko tidak optimal dan hanya dikelola oleh kelompok terbatas.

Secara keseluruhan pembahasan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat di Desa Singkuang II telah

berjalan, namun belum sepenuhnya memenuhi prinsip partisipasi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Diperlukan upaya perbaikan dalam pemerataan keterlibatan masyarakat, peningkatan transparansi, penguatan kapasitas secara menyeluruh, serta pengelolaan potensi lokal yang lebih partisipatif. Dengan demikian, dana desa tidak hanya menjadi instrumen pembangunan fisik dan ekonomi, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat yang sesungguhnya.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa pada bidang ekonomi di Desa Singkuang II telah berlangsung, namun belum sepenuhnya optimal. Masyarakat pada dasarnya telah dilibatkan dalam berbagai kegiatan ekonomi pasca bantuan dana desa dan kehadiran mereka turut membantu pemerintah desa dalam pelaksanaan program. Namun, keterlibatan aktif tersebut belum merata karena partisipasi cenderung disesuaikan dengan data penerima bantuan, sehingga hanya melibatkan kelompok tertentu dan berpotensi menimbulkan ketimpangan partisipasi di tingkat masyarakat.

Dari aspek transparansi dan akses informasi, pemerintah Desa Singkuang II telah menyediakan beberapa saluran penyampaian informasi, baik secara langsung, melalui kepala dusun, maupun melalui media sosial. Namun dalam praktiknya, masyarakat lebih banyak memperoleh informasi hanya melalui kepala dusun atau RT setempat, sehingga akses informasi belum sepenuhnya terbuka dan merata. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya pemahaman masyarakat

terhadap pengelolaan dana desa secara menyeluruh.

Dalam hal keadilan dan kesetaraan, penelitian ini tidak menemukan adanya praktik diskriminasi secara langsung terhadap masyarakat. Meskipun demikian, keadilan dalam penyaluran bantuan dan pelibatan masyarakat belum sepenuhnya terwujud, karena masih terdapat ketidaktepatan sasaran penerima bantuan serta keterlibatan partisipasi yang bersifat penyiaran. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan dan kesetaraan dalam partisipasi masyarakat masih perlu diperkuat.

Penguatan kapasitas masyarakat melalui pemberdayaan dan pelatihan secara normatif telah direncanakan oleh pemerintah desa, namun implementasinya belum berjalan secara maksimal. Pemberdayaan masyarakat cenderung terbatas pada aparatur desa atau kelompok tertentu, sementara masyarakat umum belum memperoleh kesempatan yang setara untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mendukung kegiatan ekonomi desa.

Sementara itu, pemanfaatan konteks lokal melalui pengembangan usaha sarang burung walet menunjukkan keselarasan dengan potensi dan mata pencaharian masyarakat setempat. Konteks lokal tersebut mempermudah masyarakat dalam beradaptasi terhadap kegiatan ekonomi yang dikembangkan desa. Namun pengelolaan usaha tersebut belum optimal dan cenderung mengalami stagnasi akibat lemahnya penguatan kapasitas serta kurang maksimalnya pengelolaan, sehingga dampaknya terhadap peningkatan ekonomi masyarakat belum signifikan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arumdani, N., & Kriswibowo, A. (2022). Model partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Badan Usaha

- Milik Desa (BUMDes) di Desa Dadapan Kecamatan Pringkuku Kabupaten Pacitan. *Jurnal Sosial Ekonomi dan Humaniora* , 8(2), 214–221.
- Conyers, D. (1991). *Perencanaan sosial di dunia ketiga* . Yogyakarta: UGM Pers.
- Daulay, HP (tahun tidak disebutkan). *Sejarah dan perkembangan wilayah pantai barat Mandailing* . Medan: (penerbit tidak disebutkan).
- Drajat Tri Kartono, HN (2016). *Konsep dan teori pembangunan* . Jakarta: (penerbit tidak disebutkan).
- Elsi, SD, & Bafadhal, F. (2019). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui BUMDes di Desa Tanjung Lanjut Sekernan Muaro Jambi. *Rambideun: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* , 2(2), 33–37.
- Friedmann, J. (1992). *Pemberdayaan: Politik pembangunan alternatif* . Cambridge: Blackwell Publishers.
- Hayat, & Makmudah, M. (tahun tidak disebutkan). Pencegahan terhadap tindak pidana korupsi pemerintahan desa: Kajian politik kebijakan hukum sumber daya alam desa. (Nama jurnal tidak disebutkan) .
- Kartono, HN (2016). *Konsep dan teori pembangunan* . Jakarta: (penerbit tidak disebutkan).
- LAN RI. (1999). *Modul sosialisasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah* . Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.
- Mikkelsen, B. (1999). *Metode penelitian partisipatoris dan upaya-upaya pemberdayaan: Sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mulyadi Soepardi, E. (tahun tidak disebutkan). *Memahami kerugian negara sebagai salah satu unsur tindak pidana*. (Makalah atau buku, keterangan penulis tidak disebutkan) .
- Muslimin, Mappamiring, & Nurmaeta, S. (2012). *Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa pada desa*. (Nama jurnal tidak disebutkan) .
- Naimah. (2017). *Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas keuangan desa pada Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai*. *Jurnal Program Studi Magister Akuntansi Universitas Sumatera Utara* , 2(4), 93–106.
- Rahardjo Adisasmita. (2006). *Membangun desa partisipatif* . Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rochim, N. (tahun tidak disebutkan). *Perencanaan pembangunan daerah: Strategi menggali potensi* . Jakarta: (penerbit tidak disebutkan).
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D* . Bandung: Alfabeta.

Sulistiyani, AT (2004). Kemitraan dan model-model pemberdayaan . Yogyakarta: Gava Media.

Sumarto, HS (2003). Inovasi, partisipasi, dan tata kelola yang baik . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sumodiningrat, G. (2002). Pemberdayaan masyarakat dan pengamanan jaringan sosial . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Zainudin, H. (tahun tidak disebutkan). Akibat hukum pidana praperadilan terhadap tersangka dugaan tindak pidana korupsi di Sekretariat DPRD Tulang Bawang. (Nama jurnal tidak disebutkan) .

Zainudin, H. (tahun tidak disebutkan). Implementasi pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi. (Nama jurnal tidak disebutkan) .

Zainudin, H. (tahun tidak disebutkan). Implikasi pengembalian keuangan negara terhadap hukuman hakim dalam perkara tindak pidana korupsi dana bantuan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan di Provinsi Lampung. (Nama jurnal tidak disebutkan) .